

BIG ISSUE

Tokoh Agama dan Ormas Islam Dukung Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.BIGISSUE.ID

Dec 11, 2023 - 14:59



1. PERGERAKAN EKONOMI SANGAT MELAMBAJUKAN MENYEBAB LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MENJADI NEGATIF
2. PEMERATAAN PEMBANGUNAN TIDAK AKAN TERCAPAI
3. TARGET RPJMD TIDAK AKAN TERCAPAI

2 LANGKAH STRATEGIS LUAR BIASA PEMDA
PENDAPATAN OPTIMAL, PROGRAM KEGIATAN BERJALAN, TARGET TERCAPAI

PERIODE 2021-2023 PORTOFOLIO

DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH TETAP PEMBANGUNAN DENGAN SKALA MAKA PADA TAHUN 2024, DILAKUKAN UPAYA

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pada hari senin, 11 Desember 2023, Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata menyampaikan ekspose terkait tentang Transparansi APBD dan strategi pemulihan APBD TA. 2024, bertempat di Gedung Islamic Centre Pangandaran, undangan lebih kurang sebanyak 500 orang dari berbagai elemen masyarakat, Tokoh agama, MUI, PC. NU, Muslimat, Muhamadiyah, Ansor, Fatayat dan Ormas-ormas islam yang ada di Kabupaten

Pangandaran.

Tujuan dari kegiatan ekspose dimaksud adalah bagian dari transparansi program dan kegiatan yg sudah, sedang dan akan di laksanakan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Namun sangat disayangkan tidak semuanya hadir, padahal pokok bahasannya menarik terkait dengan permasalahan yang sekarang sedang viral hari-hari ini yaitu pinjaman jangka panjang atau Portofolio, hari ini banyak sekali terjadi simpang siur informasi yang sampai-sampai kita sulit membedakan informasi yang benar dan yang hoax's atau bohong. Padahal ini adalah momentum yang sangat baik, dalam rangka mencari penjelasan dan kebenaran.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Pangandaran memaparkan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran, diantaranya infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Program kegiatan tersebut bahkan ada yang banyak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Lanjut Bupati Pangandaran memaparkan APBD Kabupaten Pangandaran, dari pendapatan sampai pengeluaran atau belanja Daerah yang akan di laksanakan di tahun 2024.

Menyikapi pemaparan Bupati Pangandaran, Ajengan Ucu Saeful Aziz ketua LDNU Kabupaten Pangandaran mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini terkait dengan Transparansi Anggaran. "Jarang loh Bupati membedah APBD di depan umum bahkan temen-temen awak media sendiri menyaksikan, sorang Bupati memparkan APBD dengan ringid dan terperinci" . Ini Zaman nya keterbukaan informasi publik dan Kabupaten Pangandaran telah membuktikan bahwa Kabupaten Pangandaraan adalah salah satu Kabupaten yang terbuka dan transparan.

Kami yang hadir juga kagum terhadap sosok H. Jeje Wiradinata yang tidak mudah lelah fisiknya, beliau adalah typical Pemimpin yang kerja keras, terukur dan jelas outputnya.

Kami para tokoh agama dan aktivis ormas islam, menyayangkan kepada para pihak yang mempolitisir permasalahan ini, bahaya sekali apabila sebuah masalah bukannya di cari solusinya justru malah di politisasi, ini akan berakibat saling fitnas, saling benci, saling dendam, saling menghasut, apalagi apabila oknum sengkuni politik masuh, maka perpecahan akan sangat mudah terjadi. Kami tidak mengharapkan hal itu terjadi, kami mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat sebaiknya menahan diri, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan, tidak mudah diadu domba dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan, agar pangandaran konsusif penuh cinta damai, sehingga wisatawan betah ke pangandaran dan iklim investasi stabil sehingga APBD akan semakin cepat pulih.

Diahir sesi semua yang hadir menyatakan sikap, pernyataan sikap tersebut di pandu oleh Ajengan Ucu Saeful Aziz ketua LDNU Kabupaten Pangandaran, diantara poin-poin pernyataannya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih intens dalam melaksanakan sosialisasi dan

transparansi;

2. Pemerintah tidak boleh anti kritik dan menerima berbagai aspirasi masyarakat;
3. Masyarakat tidak kehilangan etika dalam mengkritisi Pemerintah;
4. Kemaslahatan harus menjadi spirit utama dalam berbagai Sendi kehidupan;
5. Semua kritik harus konstruktif bukan destruktif;
6. Hal-hal yang menyangkut hukum dan regulasi tentu semua ada ranahnya dan harus di pertanggungjawabkan;
7. Apresiasi dan mendukung kinerja Pemerintah selama mendatangkan masalah.

Sebelum sosialisasi ditutup Jeje juga menjelaskan, bahwa kita mendukung upaya pemulihan APBD Kabupaten Pangandaran dengan pola Potofolio. (Anton AS)